

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi sudah menyebar merata di negara ini, tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Wijayanti (2016:1) menyatakan bahwa korupsi atau rasuah (bahasa Latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Wibowo (2013:22) menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya. Berdasarkan uraian mengenai korupsi oleh dua para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah tindakansangat merugikan bagi negara, menjadikan masyarakat miskin serta menghambat kesejahteraan masyarakat.

b. Jenis-Jenis Korupsi

Tindakan korupsi sudah terjadi sejak dahulu, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Tindakan korupsi dimulai dari tindakan kecil seperti datang tidak tepat waktu, berbohong, menerima hadiah. Tindakan yang berawal kecil kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan, hal tersebut akan berdampak buruk. Alatas dalam Chaerudin, dkk (2008:2) menjelaskan jenis-jenis korupsi sebagai berikut:

- 1) Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- 2) Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekananan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
- 3) Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
- 4) Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
- 5) Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- 6) Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan.
- 7) Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Tindakan korupsi beranekaragam yang dapat merugikan sesama manusia. Pawiroputro, dkk (2011: 12) menyebutkan jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- 1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
- 2) Penggelapan dalam jabatan.
- 3) Pemerasan dalam jabatan.

- 4) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).
- 5) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara negeri/ penyelenggara negara).

Jenis tindakan korupsi beranekaragam, pada intinya tindakan korupsi adalah tindakan yang dilakukan tidak jujur untuk mengambil hak-hak orang lain yang akan merugikan dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Tindakan korupsi yang sering dilakukan di dunia pendidikan yaitu menyotek saat ujian, datang sekolah selalu terlambat, membolos sekolah, tidak mengerjakan PR. Tindakan-tindakan tersebut jika dibiarkan saja maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan di masa depan akan menimbulkan tindakan korupsi, oleh karena itu diperlukan pendidikan antikorupsi untuk mencegah, mengurangi bahkan memberantas tindakan korupsi.

c. Penyebab Korupsi

Tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial, ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Penyebab utama melakukan tindakan korupsi karena ada faktor dalam diri seseorang yang mendorong, seperti sifat yang tidak pernah merasa puas, merasa iri pada orang lain bahkan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Hartanti (2005: 11) menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- 2) Kolonialisme. Suatu pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpendang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakhahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- 5) Tidak adanya sanksi yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Penyebab dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang berbeda-beda. Merican dalam Wibowo (2013:31-33), menyatakan bahwa korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- 1) Warisan dari pemerintah kolonial Belanda.
- 2) Korupsi disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakmerataan.
- 3) Gaji yang rendah.
- 4) Persepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang, sementara pelakunya hanya mendapatkan sanksi ringan.
- 5) Pengaturan yang bertele-tele.
- 6) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Penyebab dari tindakan korupsi yang telah diuraikan di atas terdapat kesamaan dari kedua ahli yaitu kurangnya pengetahuan, kemiskinan, hukum yang tidak tegas, dan kolonialisme. Macam-macam penyebab korupsi yang telah dijelaskan merupakan penyebab

yang sangat kompleks, yang seharusnya dapat dicegah agar mengurangi bahkan memberantas tindakan korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang menyebabkan kerusakan moral pada diri seseorang.

d. Upaya Mengatasi Korupsi

Sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan peduli dengan bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan membunuh tindakan korupsi, agar bangsa dan negara ini bersih dari tindakan korupsi. Pasal 13 Undang-Undang Dasar No 30 tahun 2002 menjelaskan penyelenggaran program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Lisdiana dan Saputro (2014:147) menyatakan bahwa upaya mengatasi korupsi Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari tiga unsur pembentuk yaitu:

- 1) Pencegahan (*preventif*).
- 2) Penindakan (*reprseif*).
- 3) Peran serta masyarakat.

2. Pendidikan Antikorupsi

a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Melihat dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi maka pemerintah melakukan integrasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk kesadaran pada masyarakat terhadap dampak negatif dari tindakan korupsi. Wibowo

(2013: 38) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Wijaya (2014: 24) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan formal di keluarga, serta pendidikan formal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi diterapkan di sekolah dasar bahkan sampai perguruan tinggi adalah untuk mencegah, mengurangi memberantas tindakan korupsi serta mengupayakan agar generasi muda tidak menerima, tidak memaafkan, serta menolak melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan dan menghambat kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan antikorupsi yaitu:

Tabel 2.1 Nilai-Nilai dalam Pendidikan Antikorupsi

No	Nilai	Deskripsi
1.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

No	Nilai	Deskripsi
5.	Tanggungjawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6.	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap, dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/ berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenag-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

(Wibowo, 2013: 45-46)

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi seperti tanggungjawab harus ada dalam diri siswa. Siswa yang memiliki sifat tanggungjawab dalam diri akan terhindar dari tindakan korupsi, yang semakin marak di bangsa dan negara ini. Harapan penanaman sikap tanggungjawab pada siswa agar mampu membangun dan membentuk sikap antikorupsi pada diri siswa.

c. Akhlak

Akhlak merupakan bentuk tingkah laku seseorang yang tertanam dalam dirinya dan akan muncul secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan lebih dahulu serta dorongan dari orang lain. Imam Al-Ghazali dalam Anwar (2010:11) menjelaskan bahwa akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Abdul Karim Zaidan dalam Iiyas (1999 : 2) menyatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Akhlak mengacu pada perbuatan, tingkah laku, sifat manusia. Allah SWT berfirman : (Q.S Asy-Syams [91] 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”Pengembangan akhlak diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan dari lingkungan.

d. Nilai Tanggungjawab

Sikap tanggungjawab perlu ditanamkan pada diri siswa, karena mengarah pada kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik. Lickona (2013: 95) menjelaskan bahwa tanggungjawab adalah sisi aktif moralitas. Tanggungjawab meliputi peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberikan kontribusi terhadap

masyarakat, meringankan penderitaan orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Salah satu nilai karakter yang diterapkan dalam diri siswa adalah tanggungjawab. Penerapan sikap tanggungjawab pada diri siswa agar dapat bertanggungjawab sebagai siswa di sekolah.

Siswa yang memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dapat dikatakan seseorang yang bertanggung jawab.

Yaumi (2014:114) menyatakan bahwa orang yang memiliki tanggungjawab dapat menunjukkan karakter sebagai berikut:

- 1) Selalu mencari tugas dan pekerjaan apa yang harus segera diselesaikan.
- 2) Menyelesaikan tugas tanpa diminta atau disuruh untuk mengerjakannya.
- 3) Memahami dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.
- 4) Berpikir sebelum dibuat.
- 5) Melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal.
- 6) Membersihkan atau membereskan segala sesuatu yang digunakan setelah menggunakan sekalipun tanpa ada orang lain yang melihatnya.
- 7) Selalu berusaha berbuat sebaik mungkin.
- 8) Terus berbuat dan tidak berhenti sebelum menyelesaikannya.
- 9) Ikhlas berbuat karena alasan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perlunya sikap tanggungjawab diterapkan pada diri siswa, yaitu agar siswa selalu berusaha dan menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai siswa. Siswa yang tidak memiliki sikap tanggungjawab pada dirinya maka siswa tersebut tidak peduli dengan diri sendiri dan oranglain. Sikap tanggungjawab dapat juga melatih siswa agar dapat menerima konsekuensi apa yang telah dilakukannya.

Tabel 2.2 Indikator Sikap Tanggungjawab

No	Indikator Sekolah	Indikator Kelas
1.	Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis.	Pelaksanaan tugas piket secara teratur.
2.	Melakukan tugas tanpa disuruh.	Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah.
3.	Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat.	Mengajukan usul pemecahan masalah.
4.	Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas.	

(Kemdiknas, 2010:31)

Tujuan sikap tanggungjawab diterapkan pada diri siswa adalah agar siswa dapat menghargai waktu, dengan siswa memiliki sikap tanggungjawab maka akan melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, serta melatih siswa untuk berani menghadapi konsekuensi dan tantangan-tantangan dari pilihan hidupnya.

e. Berpikir Kritis

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dan memberi nasehat. Johnson (2009: 185) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Susanto (2013:121) berpendapat bahwa berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Tujuan berpikir kritis adalah membantu memahami

bagaimana memandang diri sendiri, bagaimana memandang dunia, dan bagaimana berhubungan dengan oranglain.

Tabel 2.3 Indikator Berpikir Kritis

Indikator	Penjelasan
1. Memberikan penjelasan sederhana.	a. Memfokuskan pertanyaan. b. Menganalisis pertanyaan. c. Bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasan.
2. Membangun keterampilan dasar.	a. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya. b. Mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi.
3. Menyimpulkan.	a. Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. b. Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. c. Membuat dan menentukan nilai pertimbangan.
4. Memberikan penjelasan lanjut.	a. Mendefinisikan istilah dan pertimbangan definisi dalam tiga dimensi. b. Mengidentifikasi asumsi.
5. Mengatur strategi dan taktik.	a. Menentukan tindakan. b. Berinteraksi dengan orang lain.

(Susanto, 2013:125-126)

3. Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Penerapan pendidikan antikorupsi pada penelitian ini dibantu dengan model pembelajaran kontekstual atau *Contextual Teaching Learning* (CTL). Suprijono (2009:79) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual atau *Contextual Teaching Learning* (CTL) merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran *Contextual Teaching Learning* menurut Suyadi (2013: 95) yaitu.

- a. Keunggulan pembelajaran *Contextual Teaching Learning*, yaitu:
 - a) Pembelajaran kontekstual dapat mendorong siswa menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata.
 - b) Pembelajaran kontekstual mampu mendorong siswa untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata.
 - c) Pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi.
- b. Kelemahan pembelajaran *Contextual Teaching Learning*, yaitu:
 - a) CTL membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk bisa memahami semua materi.
 - b) Guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam metode CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi.
 - c) Upaya menghubungkan antara materi di kelas dengan realitas di dalam kehidupan sehari-hari siswa rentan kesalahan.
- c. Langkah-Langkah dalam Pembelajaran CTL

Langkah- langkah pembelajaran *Contextual Teaching Learning* Menurut Majid (2013:229) penerapan pembelajaran CTL dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya.
- 2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.
- 3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
- 4) Ciptakan masyarakat belajar.
- 5) Hadirkan model sebagai pembelajaran.
- 6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan.
- 7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.

Penerapan pendidikan antikorupsi dengan bantuan pembelajaran kontekstual atau *Contextual Teaching Learning* (CTL) diharapkan guru mampu mentransformasikan nilai-nilai antikorupsi, jika ditanamkan pada diri peserta didik akan memiliki manfaat bagi kehidupan di masa depan, salah satunya untuk mencegah serta

mengurangi tindakan korupsi yang sangat merugikan serta menyebabkan kemiskinan terhadap bangsa dan negara.

B. Hasil penelitian Relevan

Jurnal penelitian yang relevan adalah referensi untuk menunjukkan bahwa penelitian ini menarik sebagai penelitian. Penelitian ini tidak ada kesamaan yang persis dengan jurnal penelitian yang relevan, namun terdapat variabel yang sama yaitu pendidikan antikorupsi. Sehingga dengan ada persamaan variabel pendidikan antikorupsi pada jurnal relevan maka dapat mendukung penelitian ini. Jurnal penelitian yang relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini terdapat lima jurnal, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Khusna (2016) dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi”. Hasil dari penelitian ini yaitu guru PAI menumbuhkan karakter antikorupsi dengan melatih sholat lima waktu, menghargai kejujuran, menggunakan metode untuk melatih antikorupsi, melatih peserta didik bertanggungjawab, disiplin waktu, belajar di luar kelas dan memberi sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harmanto (2012) dengan judul “Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi guru Pendidikan Kewarganegaraan tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik.

Penelitian yang dilakukan Choiriyah, dkk (2017) dengan judul “Konsep Pembelajaran Pkn dalam Menanamkan Pendidikan AntiKorupsi Sejak Dini Disekolah Dasar.” Pelaksanaan pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara penerapan divisi dan misi serta budaya sekolah yang meliputi berbagai kegiatan perilaku warga sekolah, kantin kejujuran dan kedisiplinan serta tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Gitonga (2016) dengan judul “*Combating Corruption and Unethical Conduct through Education*” (Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Tidak Etis melalui Pendidikan). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

“To cause cultural and moral re-engineering and to strengthen the capacity of the public to demand accountability, transparency, responsibility, uniformity and responsiveness from service providers and to proactively participate in the governance process, all people must be educated of what constitutes corruption and what role they can play in combating it”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya dan moral dibangun kembali dan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk menuntut akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keseragaman dan responsif dari penyedia layanan dan secara proaktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan, semua orang harus mengetahui tentang apa yang merupakan korupsi dan apa peran masyarakat dalam memberantas tindakan korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Assegaf (2015) dengan judul “*Policy Analysis And Educational Strategy For Anti Corruption In Indonesia And Singapore*”(Analisis Kebijakan Dan Pendidikan Strategi Untuk Korupsi Anti Di Indonesia Dan Singapura). Hasil penelitian ini yaitu : *first, Indonesia and*

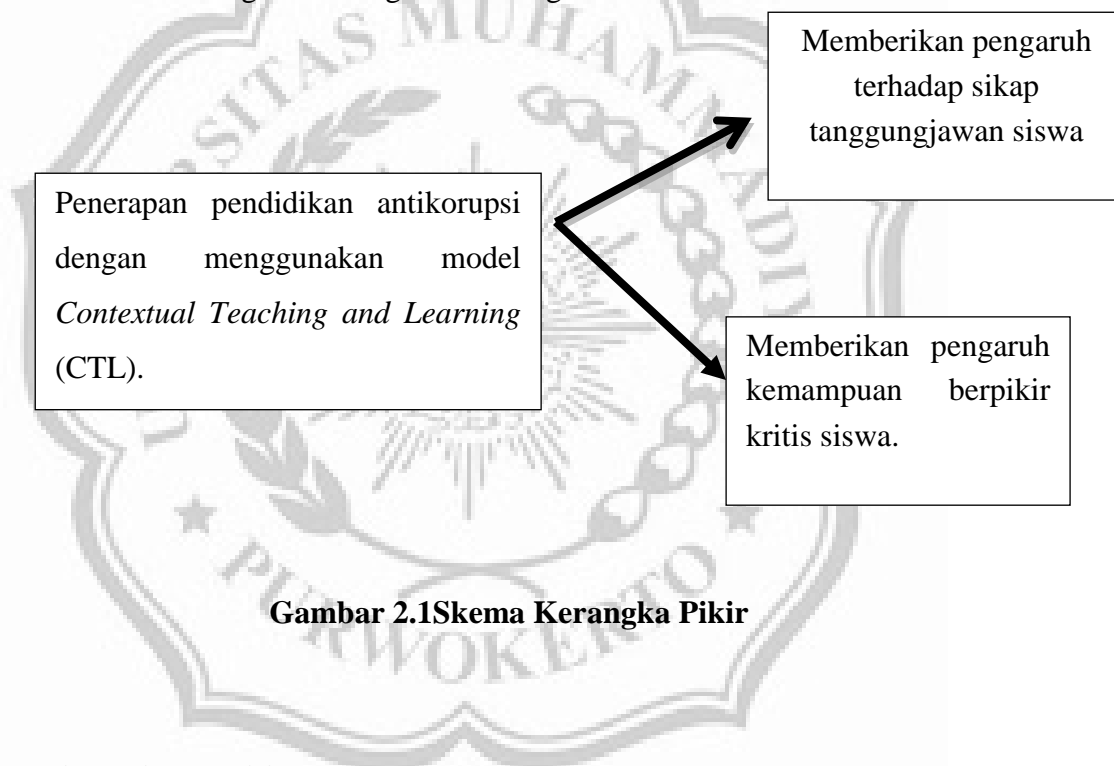
Singapore have legal basis and foundation prescribed in detailed rules, including the loading rules in forms of bribes and gratuities. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, Indonesia dan Singapura memiliki dasar hukum dan landasan yang ditentukan dalam aturan rinci, termasuk aturan pemuatan dalam bentuk suap dan gratifikasi.

Berdasarkan penelitian relevan telah dilakukan oleh Khusna tahun 2016, Harmanto tahun 2012, Gitonga tahun 2016, Assegaf tahun 2015 serta Choiriyah, dkk tahun 2017 maka penelitian ini akan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Tujuan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaran yang lain supaya anak didik mampu membangun nilai-nilai antikorupsi seperti tanggungjawab dan jujur, sehingga dapat mencegah, mengurangi serta memberantas tindakan korupsi agar terbebas dengan tindakan korupsi di masa depan. Penelitian ini juga tidak ada kesamaan persis dengan penelitian relevan telah dilakukan oleh Khusna tahun 2016, Harmanto tahun 2012, Gitonga tahun 2016, Assegaf tahun 2015 serta Choiriyah, dkk tahun 2017 namun terdapat variabel yang sama yaitu pendidikan antikorupsi. Sehingga dengan ada persamaan variabel pendidikan antikorupsi pada penelitian relevan yang telah dilakukan maka dapat mendukung penelitian ini

C. Kerangka Pikir

Pembentukan karakter merupakan tugas seorang guru untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri peserta didik, yang merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran. Kepribadian yang baik pada diri peserta

didik akan dapat memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan sekitar. Penerapan pendidikan antikorupsi dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL), diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap sikap tanggungjawab dan pengetahuan korupsi di kelas V SD Negeri 02 Pliken yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi agar peserta didik memiliki sikap antikorupsi. Kerangka pikir dirumuskan dengan skema gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1Skema Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian relevan dan kerangka berpikir diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap tanggungjawab di kelas V SD Negeri 02 Pliken.
2. Terdapat pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap kemampuan berpikir kritis di kelas V SD Negeri 02 Pliken.